

**PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN TATA TERTIB MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
(Studi Kasus Di Universitas Muhamadiyah Surkarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

**Disusun Oleh:**

**WATIAH**

**C.100.140.346**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN TATA TERTIB MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
(Studi Kasus Di Universitas Muhamadiyah Surkarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**WATIAH**

**C.100.140.346**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing:



**Kuswardani, S.H, M.Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA (Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Oleh:

**WATIAH**  
**C100140346**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin, 16 April 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Kuswardani, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchammad Iksan S.H., M.H  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto S.H., M.Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)

(  )

(  )

(  )

Dekan,



  
Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Mei 2018

Penulis



**WATIAH**  
**C.100.140.346**

**PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN TATA TERTIB MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
(Studi Kasus Di Universitas Muhamadiyah Surakarta)**

**ABSTRAK**

Peraturan tata tertib mahasiswa sangatlah penting dalam sebuah universitas, setiap pelanggaran kedisiplinan akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan tata tertib yang ada, maka dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Surakarta dibuatlah sebuah aturan yang mengatur Tata tertib mahasiswa yang terdapat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor:021/IV/2014 tentang Tata Tertib Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menekankan kepada regulasi yang mengatur tata tertib mahasiswa dan mekanisme yang di gunakan untuk menyelesaikan pelanggaran tata tertib yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dimana dalam regulasi di atur terkait larangan, pemalsuan, pencurian dan perusakan, pemerasan dan pengancaman, penganiayaan, Narkotika, Psikotropika, obat berbahaya (Narkoba),minuman keras serta benda-benda yang berbahaya, perbuatan asusila dan perjudian, serta penghinaan dan pencemaran nama baik, dan untuk mekanisme penyelesaiannya di bagi menjadi dua yaitu dalam ranah satuan keamanan dan yang kedua dalam ranah Tim Disipin Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kata kunci : tata tertib, kedisiplinan , mekanisme penyelsaian pelanggaran disiplin mahasiswa

**ABSTRACT**

Student disciplinary rules are very important in a university, any disciplinary offenses will be subject to sanctions based on existing rules of conduct. Then in this case the University of Muhammadiyah Surakarta made a rule that regulates the discipline of students contained in Rector's Decree of Muhammadiyah University of Surakarta Number: 021 / IV / 2014 on Student Rules at Muhammadiyah University of Surakarta. This study emphasizes the regulation governing student discipline and the mechanisms used to resolve the violations of the existing order in Muhammadiyah University of Surakarta where in the regulations regulated related to prohibition, counterfeiting, theft and destruction, extortion and threats, ill-treatment, Narcotics, Psychotropic, dangerous drugs (Drugs), liquor and dangerous objects, immorality and gambling, as well as humiliation and defamation, and for the settlement mechanism is divided into two namely in the security unit and the second in the realm of Disipin Team of Muhammadiyah University of Surakarta.

Keywords: Disciplinary, Discipline, Mechanism Of Student Discipline Violation Settlement

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>1</sup>

Suatu pendidikan pasti ada yang namanya suatu sistem yang mengatur terkait adanya tata tertib baik bagi mahasiswa ataupun pegawai dari suatu instansi. Hal ini senada dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memiliki tata tertib tersebut. Adanya tata tertib ini tidak mungkin ada tanpa diawali suatu pelanggaran, seperti halnya kasus yang sering terjadi adalah pencurian diwilayah kampus. Sebuah upaya penyelesaian yang akan dibahas dan diselesaikan oleh pihak yang berwenang di Universitas Muhammadiyah Surakarta mengingat kasus tersebut adalah tindak pidana yang terdapat pada Pasal 362 berbunyi :<sup>2</sup>

*“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

Pihak yang berwenang untuk menyelesaikan atau memutus perkara ini dalam lingkup kampus khususnya Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah Tim Disiplin<sup>3</sup> yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Namun apakah selama ini regulasi yang mengatur terkait pelanggaran tata tertib ini sudah sesuai dengan yang diharapkan dan apakah mekanisme penyelesaiannya sudah sesuai atau belum.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

<sup>2</sup> Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>3</sup> Pasal 1 Point 13 *Tim disiplin adalah tim yang bertugas menerima, membuktikan, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa serta merekomendasikan sanksi kepada pejabat yang berwenang.* Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor : 076/1/2005 Tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor 49/1/1999.

Berdasarkan uraian dan paparan diatas, peneliti ingin mengangkatnya dalam penelitian skripsi dengan judul **“Proses Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Surakarta)”**.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis – Empiris. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang diarahkan pada upaya melihat permasalahan dengan sifat hukum normatif, sedangkan pendekatan empiris pendekatan yang diarahkan pada upaya melihat permasalahan dengan sifat hukum nyata atau sesuai kenyataan hidup dimasyarakat.<sup>4</sup> dimana penelitian ini terfokus terhadap Regulasi dan Mekanisme penyelesaian pelanggaran tata tertib yang berada di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan menggunakan metode pendekatan secara kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamanian serta tidak dilakukan dilaboratorium melainkan harus terjun dilapangan.<sup>5</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Regulasi Terkait Tata Tertib di Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Keberadaa aturan tata tertib mahasiswa amatlah penting dalam sebuah universitas maka penulis memaparkan urgensi adanya tata tertib mahasiswa dari beberapa aspek baik secara filosofis, sosiologi, dan yuridis. Aturan atau dalam hal ini adalah tata tertib mahasiswa ditiap pasal didalamnya disertai dengan sanksi dan ukuran pemberian sanksi yang terdapat didalam aturan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Sanksi tersebut bertujuan agar dapat timbul efek jera bagi mahasiswa yang melanggar dan tidak akan melakukan pelanggaran itu untuk kedua kalinya ataupun seterusnya. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam

---

<sup>4</sup> Wawan Muhawan Hariri, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Cv Pustaka Setia, hlm,30-31.

<sup>5</sup> Muhammad Nazir, 1986. *Metode Penelitian*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm, 159.

undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya<sup>6</sup>

Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak<sup>7</sup>, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk peraturan hukum pidana di Indonesia masih membedakan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran<sup>8</sup> dimana kejahatan adalah *Rechtsdelict*, artinya perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan keadilan<sup>9</sup>.

Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan sedangkan pelanggaran adalah *Wetsdelict*, artinya perbuatan - perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang - undang menyebutkan sebagai delik<sup>10</sup>, Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada<sup>11</sup> maka apabila mahasiswa melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan ia dapat dikenakan sanksi, dimana sanksi merupakan bentuk untuk mewujudkan suatu ketertiban pada diri mahasiswa, dimana Pidana atau hukuman yang dijatuhkan senantiasa dirasakan sebagai sanksi yang istimewa oleh terpidana. Sanksi tersebut dapat berupa perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan perampasan terhadap harta benda terpidana, dan seterusnya. Dengan kata lain, hukum pidana dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus (*punishment/bijzondere leed*)<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup> Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Dan Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta : 2001, hlm 145

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, 2010. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm.100

<sup>8</sup> Supriyadi, 2015, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus". *Mimbar Hukum*. Vol. 27 No 3. Hlm 391

<sup>9</sup> Soerjono Soekonto, 1984, *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 44

<sup>10</sup> Tri Andrisman, 2007. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hlm 86

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqi, M Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpres, Hlm. 46

<sup>12</sup> M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Paragonatama Jaya, Hlm. 3



Berdasarkan hal tersebut diatas maka untuk menciptakan sebuah ketertiban maka perlu adanya aturan tentang tata tertib mahasiswa dimana regulasi terkait tata tertib mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta terdapat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor : 021/IV/2014 tentang Tata Tertib Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>13</sup>. Peraturan ini yang mengatur terkait larangan, pemalsuan, pencurian dan perusakan, pemerasan dan pengancaman, penganiayaan, narkoba, psikotropika, obat berbahaya (narkoba), minuman keras serta benda-benda yang berbahaya, perbuatan asusila dan perjudian, serta penghinaan dan pencemaran nama baik yang mana keseluruhannya terdapat pembagian sub-bab pembahasan yang tertera didalam regulasi tersebut dimana tindakan-tindakan ini dikatakan sebagai pelanggaran atau perbuatan tindak pidana, karena Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah: a. Perbuatan; b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)<sup>14</sup>

Berdasarkan sub bab tata tertib diatas dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memiliki sebuah aturan dengan segala sanksinya untuk menciptakan ketertiban mahasiswa, namun dalam lapangan atau tataran praktek yang terjadi masih ada saja mahasiswa yang melakukan pelanggaran, baik itu bentuk pelanggaran ringan maupun pelanggaran yang berat. Seperti halnya pelanggaran kesusilaan delik ini paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap, penyidikan, penyelidikan, penuntutan maupun pada tahap pengambilan keputusan<sup>15</sup>. Hal ini dijelaskan kembali oleh Pak Sulardi selaku Wakil Komandan 2 (dua) Satuan Keamanan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau mengatakan bahwa terkait ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan mahasiswa, pelanggaran pasti ada, baik yang ringan maupun yang berat, ringan itu seperti : mengingatkan mahasiswa terkait parkiran yang dikenakan, dan menegur mahasiswa apabila memasukan kendaraan pada

---

<sup>13</sup> Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor : 021/IV/2014 tentang Tata Tertib Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 79.

<sup>15</sup> Leden Marpaung, 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 31

jam yang belum diperbolehkan masuk melalui pintu gerbang jika pelanggaran berat semisal: perkelahian, pencurian, perusakan barang.

### **3.2 Proses Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Penanganan pelanggaran di Universitas Muhammadiyah Surakarta maka pihak kampus memiliki mekanisme tersendiri untuk menyelesaikannya tergantung pada perbuatan yang dilanggar dan disesuaikan juga dengan sanksi atas pelanggaran tersebut

Urutan proses mekanisme penyelesaian pelanggaran tata tertib mahasiswa di ranah Satuan Keamanan: Laporan masuk ke pihak satuan keamanan tentang adanya pelanggaran, Pelapor diminta untuk mengisi identitas dan keterangan (kronologis peristiwa), Pihak satuan keamanan akan melakukan pelacakan melalui CCTV

Pelaku tertangkap akan ada proses hukum : Apabila pelaku mahasiswa UMS menggunakan mekanisme kekeluargaan / musyawarah, Apabila tidak bisa terselesaikan di ranah satuan keamanan maka kasus dapat dilimpahkan ke Tim Disiplin apabila bukan mahasiswa UMS menggunakan proses hukum

Maka jika dikembalikan pada aturan yang seharusnya memang belum sesuai, jalur kekeluargaan itu ada dikarenakan berdasarkan pertimbangan yang ada. Bapak Sulardi menjelaskan bahwa proses prosedur memang belum sesuai kalau kita kembali pada aturan Negara kita yaitu Negara Hukum sedangkan cara yang kita gunakan adalah acara kekeluargaan, namun dengan cara atau proses seperti ini ternyata ini berhasil dan membuat pelaku jera dalam arti pelaku tidak mengulangnya kembali, pertimbangan yang adapun seperti berikut : Harapan orang tua yang ingin melihat anaknya sukses, Agar nama baiknya tidak tercemar, Alasan mengapa dia mencuri, seperti kebutuhan hidup yang mendesak<sup>16</sup>.

Terkait bagaimana prosedural yang dilakukan dalam taraf Tim disiplin, penulis telah melakukan wawancara dengan Pak Yatmin selaku anggota Tim

---

<sup>16</sup> Sulardi, *Wawancara pribadi* Wakil komandan dua satuan keamanan Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Senin 5 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB

Disiplin. Skema atau alur proses penyelesaian pelanggaran tata tertib mahasiswa di lingkup Tim Disiplin, Laporan masuk ke Tim Disiplin, Pemanggilan para pihak : a.) Pelapor / korban b.) pelaku c.) saksi, Pemeriksaan keterangan secara bergantian atau terpisah para pihak disertai alat bukti, Tim Disiplin akan berunding setelah semua pihak selesai dimintai keterangan dan alat bukti, Menghasilkan suatu keputusan yang akan direkomendasikan ke rektor, Putusan memberikan putusan atau sanksi

Pasal 21 bab XIV Tata Cara Dan Prosedur Penjatuhan Sanksi Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor : 076/I/2005 Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta: Pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan atau kejahatan oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin, Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Tim Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan tersangka atau saksi melalui surat sebanyak--banyaknya 2 (dua) kali, Pemanggilan tersangka diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga perbelaan, Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan, Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan kepada pejabat yang berwenang

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Regulasi Terkait Tata Tertib di Universitas Muhammadiyah Surakarta Bahwa aturan tata tertib sudah mengalami beberapa kali amandemen dan perubahan yang ada mengikuti perkembangan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, dan regulasi terkait tata tertib bagi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta terdapat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Nomor:021/IV/2014 tentang Tata Tertib Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sub-bab Larangan dinyatakan sebagai berikut : poin larangan yang sering dilakukan mahasiswa terkait penggunaan baju yang tidak disiplin, adanya kegiatan mahasiswa pada malam hari melebihi batas ketentuan sehingga banyak mahasiswa yang tidur di kampus, dan perbuatan pelanggaran beratpun ada salah satunya seperti pencurian helm.

Sub-bab Pemalsuan dinyatakan sebagai berikut : menurut Bapak Sulardi selaku wakil komdan dua satuan keamanan Universitas Muhammadiyah Surakarta terkait pemalsuan pernah terjadi satu kali, hal tersebut terjadi karena pihaknya kesulitan untuk membedakan antara ijazah yang asli dan palsu. Sedangkan Sesuai dengan data yang di peroleh dari tim disiplin pemalsuan sendiri pernah terjadi lebih dari satu kali dan paling banyak terjadi pada tahun 2014.

Sub-bab Pencurian dan Perusakan dinyatakan sebagai berikut: pencurian di Universitas Muhammadiyah Surakarta menempati posisi paling banyak terjadi, berdasarkan data yang sudah penulis analisis berdasarkan laporan masuk yang ada pada satuan keamanan, dimana penulis membuat diagram antara 2014-2017 dan untuk pelanggaran mengenai perusakan barang menurut bapak Suyatmin beliau mengatakan bahwa ini pernah terjadi yaitu pada saat pemilu raya Tahun 2016, yaitu perusakan tong hasil suara.

Sub-bab Pemerasan dan Pengancaman dinyatakan sebagai berikut : Berdasarkan bentuk pelanggaran pemerasan dan pengancaman, baik pihak satuan keamanan maupun Tim Disiplin selama ini belum ada laporan masuk terkait adanya bentuk pelanggaran Penganiayaan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sub-bab Penganiayaan dinyatakan sebagai berikut: berdasarkan data laporan yang masuk pada satuan keamanan maupun Tim Disiplin belum ditemukan dan sejauh ini yang berkembang adalah berupa perkelahian antar mahasiswa.

Sebagaimana sub-bab Narkotika, Psikotropika, obat berbahaya (Narkoba), minuman keras serta benda-benda yang berbahaya dinyatakan sebagai berikut: kasus penggunaan Narkotika namun kasus ini langsung ditangani pihak kepolisian sehingga pihak Universitas tidak terlalu ikut andil dalam menangani karena ranah aturannya

sudah berbeda, kecuali apabila pelaku kembali ke Universitas maka akan ada pertimbangan lain

Sebagaimana sub-bab Perbuatan asusila dan Perjudian dinyatakan sebagai berikut : Menurut data yang masuk ke Tim Disiplin kasus ini cukup sering terjadi, dan untuk kasus perjudian sampai saat ini belum pernah ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta melakukan pelanggaran berupa perbuatan perjudian tersebut.

Sebagaimana sub-bab Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dinyatakan menurut Bapak Suyatmin, sebenarnya segala perbuatan yang pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dapat mencemarkan nama Universitas Muhammadiyah Surakarta. Namun kasus yang pernah sampai ke ranah Tim Disiplin pernah ada satu kali yaitu pada Tahun 2013.

Penanganan pelanggaran di Universitas Muhammadiyah Surakarta oleh pihak kampus memiliki mekanisme tersendiri untuk menyelesaikannya dan mekanisme yang ada tergantung pada perbuatan yang dilanggar dan disesuaikan juga dengan sanksi atas pelanggaran tersebut

Urutan proses mekanisme penyelesaian pelanggaran tata tertib mahasiswa di ranah Satuan Keamanan: Laporan masuk ke pihak satuan keamanan tentang adanya pelanggaran, Pelapor diminta untuk mengisi identitas dan keterangan (kronologis peristiwa), Pihak satuan keamanan akan melakukan pelacakan melalui CCTV, Pelaku tertangkap akan ada proses hukum : apabila pelaku mahasiswa UMS menggunakan mekanisme kekeluargaan / musyawarah, Apabila tidak bisa terselesaikan di ranah satuan keamanan maka kasus dapat dilimpahkan ke Tim Disiplin apabila bukan mahasiswa UMS menggunakan proses hukum.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, berdasarkan data pelanggaran diatas bahwa tiap tahunnya jumlah pelanggaran cukup banyak terutama mengenai pelanggaran pencurian yang ranahnya sudah masuk pada tingkat kejahatan dalam pidana. Maka perlu adanya sistem

pengawasan atau pemantauan yang lebih ketat terutama pada tingkat satuan keamanan dimana petugas inilah yang terjun langsung kelapangan.

*Kedua*, berdasarkan data diatas butuh adanya sosialisasi kepada mahasiswa secara masif terkait adanya tim disiplin, hal ini bertujuan juga untuk pencegahan atau menimbulkan rasa takut kepada mahasiswa untuk tidak akan berbuat pelanggaran tata tertib di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

*Ketiga*, perlu kiranya ada sosialisasi atau pembekalan pemahaman kepada mahasiswa baru tentang tata tertib yang ada di UMS, ini merupakan bentuk pencegahan awal kepada para mahasiswa, agar tumbuh sikap disiplin dan kesadaran tinggi pada tiap-tiap diri mahasiswa terkait tata tertib yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Ali Zaidan M, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Paragonatama Jaya

Andrisman Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung. Bandar lampung.

Effendi Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama

Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpres

Marpaung Leden, 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika: Jakarta

Muhawan Hariri Wawan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Cv Pustaka Setia.

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Dan Kejahatan Dalam Sisitem Peradilan Pidana*, Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta : 2001

Nazir Muhammad, 1986, *Metode Penelitian*, Bandung : Remaja Rosdakarya

Soekonto Soerjono, 1984, *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Pers

Supriyadi., 2015. "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus". *Mimbar Hukum*. Vol. 27 No 3:39